

STRATEGI KONTRA INTELIJEN DETASEMEN INTELIJEN KODAM IX/UDAYANA DALAM Mendukung Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL

Catur Wahyu Budiman, Bangun P. Hutajulu, Anang Setiawan

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: wahyubudiman87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kontra intelijen dalam mendukung operasi pengamanan wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, mengingat kawasan tersebut rentan terhadap ancaman infiltrasi intelijen asing, penyelundupan lintas batas, peredaran barang ilegal, dan kebocoran informasi strategis. Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer IX/Udayana memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi kontra intelijen yang diterapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan strategi dalam mendukung operasi pengamanan perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses pengkodean dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kontra intelijen dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu deteksi, investigasi, eksploitasi, dan negasi, yang didukung oleh komando pimpinan, jaringan intelijen teritorial, sinergi lintas instansi, partisipasi masyarakat, dan profesionalitas personel. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa terbatasnya personel berkualifikasi intelijen, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, dan minimnya dukungan teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kontra intelijen telah berjalan secara struktural namun belum sepenuhnya optimal secara operasional, sehingga diperlukan penguatan kapasitas personel, modernisasi teknologi, dan penguatan mekanisme koordinasi intelijen terpadu antarinstansi guna mendukung keberhasilan operasi pengamanan perbatasan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kontra Intelijen, Strategi, Operasi Pengamanan Perbatasan, Detasemen Intelijen IX/Udayana

Abstract

This research is motivated by the importance of counterintelligence in supporting border security operations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste, considering that the region is vulnerable to threats of foreign intelligence infiltration, cross-border smuggling, the circulation of illegal

goods, and strategic information leaks. The Intelligence Detachment of the IX/Udayana Military Regional Command plays a strategic role in early detection, prevention, and action against these threats. This research aims to analyze the form of counterintelligence strategy implemented, identify supporting and inhibiting factors in its implementation, and formulate efforts to strengthen the strategy in supporting border security operations. The research uses a qualitative approach with a descriptive analytical case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document reviews, then analyzed systematically through a process of coding and triangulation of sources. The results show that the counterintelligence strategy is implemented through four stages: detection, investigation, exploitation, and negation, supported by the command leadership, territorial intelligence network, cross-agency synergy, community participation, and personnel professionalism. However, its implementation still faces obstacles such as limited personnel with intelligence qualifications, suboptimal cross-agency coordination, and minimal information technology support. This study concludes that the counterintelligence strategy has been implemented structurally but has not been fully optimized operationally, so that it is necessary to strengthen personnel capacity, modernize technology, and strengthen the integrated intelligence coordination mechanism between agencies to support the success of border security operations on an ongoing basis.

Keywords: Counter Intelligence, Strategy, Border Security Operations, Intelligence Detachment IX/Udayana

Diterima: 10 Juni 2026 | Direvisi: 05 Juni 2026 | Diterbitkan: 20 Juli 2026

PENDAHULUAN

Perubahan lanskap keamanan global menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara kini tidak lagi berwujud konvensional. Perang modern semakin banyak dijalankan melalui operasi intelijen, perang informasi, dan sabotase ekonomi yang dilakukan secara tersembunyi oleh aktor negara maupun non-negara, sebagaimana ditunjukkan oleh perluasan aktivitas intelijen negara-negara besar untuk melindungi kepentingan strategisnya di berbagai kawasan. Bagi Indonesia yang berada pada posisi silang dua benua dan dua samudra, dinamika ini menuntut kesiapsiagaan intelijen yang adaptif, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang semakin menjadi arena persaingan pengaruh ekonomi, teknologi, dan intelijen antarnegara. Kajian kontemporer menegaskan bahwa kegiatan intelijen telah meluas hingga ke ruang siber dan sosial, sehingga batas antara ancaman militer dan nonmiliter kian kabur (Koswara, 2019).

Salah satu kawasan yang menghimpun nilai strategis sekaligus kerawanan tinggi adalah perbatasan darat Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL). Topografi berbukit dan hutan lebat menyulitkan pengawasan, sementara ikatan sosial lintas batas membuat mobilitas penduduk sulit dikendalikan, sehingga membuka celah bagi penyelundupan, pelintas batas ilegal, dan potensi infiltrasi intelijen asing. Dalam periode terakhir, satuan tugas pengamanan perbatasan tercatat menggagalkan sejumlah kasus penyelundupan lintas batas, mulai dari kayu cendana hingga minuman keras dan petasan (Antara, 2024; InfoPublik, 2024), sementara lembaga terkait terus

menekankan pentingnya sinergi antarinstansi guna memperkuat pengawasan terhadap potensi peredaran barang ilegal di pos lintas batas (Badan Nasional Pengelola Perbatasan [BNPP], 2025).

Dalam kerangka Doktrin Intelijen TNI Angkatan Darat, kontra intelijen merupakan sub-fungsi pengamanan yang bersifat ofensif, ditujukan untuk melumpuhkan efektivitas kegiatan intelijen lawan melalui tahapan deteksi, investigasi, eksploitasi, dan negasi. Detasemen Intelijen Kodam IX/Udayana (Deninteldam IX/Udayana), yang bertanggung jawab atas wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk perbatasan RI, RDTL menempati posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Namun demikian, temuan awal di lapangan menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi faktual (*das sein*): tahap deteksi masih bersifat pasif, kekuatan personel belum memenuhi kebutuhan ideal sesuai TOP/DSPP, koordinasi lintas instansi belum terintegrasi, dan dukungan teknologi informasi masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan kontra intelijen cenderung reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai lapis pertahanan dalam mendeteksi ancaman non-fisik di kawasan perbatasan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana strategi kontra intelijen Deninteldam IX/Udayana dalam mendukung operasi pengamanan perbatasan RI–RDTL? Rumusan masalah ini dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk dan pelaksanaan strategi kontra intelijen yang diterapkan; apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaannya; serta bagaimana strategi penguatan yang dapat dirumuskan agar pelaksanaan kontra intelijen lebih adaptif terhadap dinamika ancaman di wilayah perbatasan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi kontra intelijen yang dilaksanakan Deninteldam IX/Udayana, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan strategi guna mendukung stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI–RDTL secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif–studi kasus (*qualitative descriptive case study design*), yang dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih tepat dipahami melalui eksplorasi makna, proses, dan interaksi sosial-institusional daripada melalui pengukuran variabel secara statistik (Creswell, 2014). Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu unit analisis spesifik, yaitu Detasemen Intelijen Kodam IX/Udayana, sehingga memungkinkan penggalian fenomena secara kontekstual mengenai "apa", "bagaimana", dan "mengapa" strategi kontra intelijen dijalankan dengan pola tertentu dalam lingkungan institusi militer (Yin, 2018).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di satuan Deninteldam IX/Udayana yang berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dengan cakupan wilayah tugas meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk kawasan perbatasan darat Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste. Lokasi penelitian dipahami tidak semata sebagai wilayah geografis, melainkan juga sebagai konteks organisasi tempat fenomena diteliti berlangsung (Afrizal, 2019). Pengumpulan data dilaksanakan pada periode Mei hingga Oktober 2025.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan relevansi kapasitas dan pengalaman terhadap fenomena yang diteliti, dilengkapi dengan teknik snowball sampling apabila diperlukan penambahan informan yang direkomendasikan oleh narasumber utama (Idrus, 2009; Sugiyono, 2015). Kriteria informan mengacu pada lima aspek utama, yaitu relevansi informasi, kemampuan artikulasi pengalaman, keterlibatan langsung dalam fenomena, kesediaan diwawancarai secara terbuka, dan kestabilan kondisi psikologis pada saat wawancara berlangsung (Raco, 2010). Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri atas pejabat struktural intelijen, komandan satuan operasional, kepala pokok analisis, komandan tim, serta personel pelaksana teknis di lingkungan Deninteldam IX/Udayana, yang mencerminkan representasi dari level perencanaan hingga pelaksanaan taktis di lapangan. Objek penelitian adalah strategi kontra intelijen yang dilaksanakan Deninteldam IX/Udayana, yang meliputi bentuk pelaksanaan, efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam mendukung operasi pengamanan perbatasan.

Instrumen dan Bahan Analisis

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data, dibantu pedoman wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen pendukung. Pengolahan dan pengorganisasian data kualitatif dilakukan dengan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif NVivo 12 Plus, yang digunakan untuk proses pengkodean (coding), pengelompokan tema, dan triangulasi sumber data secara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi kontra intelijen, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta hambatan operasional yang dihadapi (Moleong, 2017). Observasi dilakukan baik secara langsung terhadap kegiatan pengamanan maupun secara tidak langsung melalui dokumentasi kelembagaan, guna membangun deskripsi rinci (thick description) yang menghubungkan tindakan, konteks, dan makna di lapangan. Studi pustaka dilakukan terhadap dokumen doktrinal dan regulasi terkait, antara lain Doktrin Intelijen TNI AD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta literatur akademik yang relevan, sebagai landasan konseptual dan bahan pembandingan terhadap temuan lapangan (Nazir, 2014).

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, yaitu penggabungan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menerapkan dua bentuk triangulasi, yakni triangulasi sumber data dan triangulasi teori, dengan menafsirkan temuan lapangan melalui perspektif teori intelijen, teori keamanan nasional, dan teori efektivitas organisasi sekaligus (Moleong, 2017).

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahap utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan melalui pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), peringkasan (*abstracting*), dan penyederhanaan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan kutipan wawancara untuk memperlihatkan pola serta hubungan sebab-akibat antarvariabel, seperti keterkaitan antara keterbatasan sarana prasarana dan efektivitas deteksi dini. Kesimpulan ditarik secara bertahap dan bersifat tentatif hingga diverifikasi silang melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen operasional. Untuk memastikan keterukuran hasil analisis, digunakan lima indikator keberhasilan strategi kontra intelijen yang disusun berdasarkan kerangka teori kontra intelijen, teori strategi, dan teori efektivitas organisasi, yaitu efektivitas deteksi dini, kualitas investigasi dan verifikasi informasi, keberhasilan eksploitasi dan negasi, tingkat koordinasi lintas instansi, serta kesesuaian dukungan sumber daya dan struktur organisasi terhadap tuntutan operasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Pelaksanaan Strategi Kontra Intelijen

Hasil pengolahan data wawancara, observasi, dan dokumen operasional menunjukkan bahwa Deninteldam IX/Udayana telah menjalankan strategi kontra intelijen sesuai empat tahapan doktrinal, yaitu *deteksi* (*detection*), *investigasi* (*investigation*), *eksploitasi* (*exploitation*), dan *negasi* (*negation*). Ringkasan temuan pada tiap tahap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Pelaksanaan Tahapan Strategi Kontra Intelijen Deninteldam IX/Udayana

Tahap	Bentuk Pelaksanaan	Kendala Utama
Deteksi	Pengamatan lapangan, analisis pola mobilitas lintas batas, kerja sama dengan Satgas Pamtas, Imigrasi, dan Bea Cukai	Bersifat pasif-reaktif; belum ada analisis prediktif; hasil masih berupa data situasional
Investigasi	Pengawasan tertutup (<i>covert surveillance</i>), pemantauan target, penelusuran jaringan	Sarana teknis terbatas; belum ada pertukaran data formal antarinstansi

Tahap	Bentuk Pelaksanaan	Kendala Utama
Eksplorasi	Pemanfaatan informasi hasil deteksi-investigasi untuk memetakan jaringan lintas batas	Minim fasilitas pendukung (ruang interogasi, alat rekam, keamanan data digital)
Negasi	Deportasi pekerja asing ilegal, penutupan jalur infiltrasi, klasifikasi dokumen rahasia	Belum ada SOP terpadu; penindakan bersifat <i>ad hoc</i> per kasus

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan analisis NVivo 12 Plus (2025)

Temuan pada tahap deteksi memperlihatkan bahwa Deninteldam IX/Udayana telah membangun kesadaran struktural terhadap pentingnya peringatan dini, namun praktiknya belum bertransformasi dari sekadar pengumpulan data lapangan menjadi produk analisis prediktif. Kondisi ini konsisten dengan prinsip kontra intelijen bahwa tahap deteksi seharusnya berfungsi sebagai *early warning system* yang mengantisipasi ancaman sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Pola serupa juga ditemukan pada tahap investigasi dan eksploitasi, yang secara prosedural telah dijalankan namun terhambat oleh keterbatasan sarana teknis dan lemahnya integrasi data lintas lembaga. Salah satu informan menegaskan kondisi ini secara langsung: "belum terdapat sistem koordinasi formal dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil investigasi" (Pasi Ops Deninteldam IX/Udayana, komunikasi pribadi, 2025), yang menggambarkan adanya *gap* antara hasil intelijen dan tindak lanjut operasional di lapangan.

Pola yang sama berulang pada tahap negasi, yang idealnya menghasilkan efek jera jangka panjang (*deterrence effect*) melalui langkah sistematis, tetapi dalam praktiknya masih bergantung pada penanganan kasus per kasus tanpa prosedur baku lintas instansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat tahap kontra intelijen telah dilaksanakan secara *struktural* tetapi belum *optimal secara operasional*, karena masing-masing tahap terhenti pada level pelaksanaan dasar tanpa penguatan sistem pendukung berbasis teknologi.

Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas hasil kajian Djatmiko (2025), yang menyimpulkan bahwa efektivitas kontra intelijen dalam menghadapi ancaman non-konvensional sangat bergantung pada kemampuan deteksi dini dan sinergi antarlembaga. Bila kajian Djatmiko berfokus pada skala nasional dan objek penyelundupan narkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa pola hambatan yang sama juga terjadi pada level operasional-taktis di satuan pelaksana perbatasan. Hal ini menandakan bahwa persoalan integrasi lintas lembaga bukan semata isu kebijakan makro, melainkan juga persoalan struktural yang berulang hingga ke tingkat implementasi lapangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas

Analisis terhadap faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi kontra intelijen dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan tiga dimensi efektivitas organisasi, yaitu *outcome* (hasil), *process* (proses), dan *structure* (struktur) (Scott, 2003). Ringkasan faktor pendukung dan penghambat berdasarkan ketiga dimensi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kontra Intelijen berdasarkan Dimensi Outcome–Process–Structure

Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Structure	Dukungan kebijakan komando atas; profesionalitas personel berkualifikasi intelijen	Belum ada sistem koordinasi permanen lintas instansi; kondisi geografis-sosial yang menyulitkan pengawasan
Process	Jaringan intelijen teritorial (Korem–Kodim–Babinsa) yang responsif; sinergi operasi gabungan dengan Satgas Pamtas, BIN, dan Polri	Sarana operasional manual; minim pelatihan teknis lanjutan (<i>cyber counterintelligence</i>)
Outcome	Partisipasi dan kesadaran masyarakat perbatasan	Rendahnya keterlibatan pemerintah daerah dan unsur sipil secara formal

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan analisis NVivo 12 Plus (2025)

Pada dimensi *structure*, dukungan kebijakan komando menjadi faktor penentu yang memberikan legitimasi struktural bagi pelaksanaan kontra intelijen, sejalan dengan argumen bahwa efektivitas organisasi militer sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan dan pembagian tanggung jawab dari pucuk komando. Pada dimensi *process*, keberadaan jaringan intelijen teritorial berjenjang, terbukti mempercepat aliran informasi meskipun belum didukung sistem komunikasi terenkripsi, sementara pada dimensi *outcome*, partisipasi masyarakat perbatasan membentuk semacam jejaring pengamanan berbasis komunitas yang berfungsi sebagai "sensor sosial" tambahan di luar kapasitas formal aparat.

Namun demikian, ketiga dimensi tersebut juga menyimpan kelemahan yang saling terkait: keterbatasan sarana modern pada dimensi *process* berdampak pada lambatnya konversi data lapangan menjadi produk intelijen strategis pada dimensi *outcome*, sementara lemahnya integrasi sistem data antarlembaga pada dimensi *structure* memperbesar risiko duplikasi pelaporan dan keterlambatan tindak lanjut. Pola saling-keterkaitan ini menunjukkan bahwa hambatan pada satu dimensi tidak dapat diselesaikan secara terisolasi, melainkan menuntut intervensi simultan pada ketiga dimensi sekaligus.

Temuan mengenai peran krusial partisipasi masyarakat dalam mendukung deteksi dini ini sejalan dengan hasil kajian Setiawati dkk. (2025) mengenai keamanan perbatasan RI–RDTL dari perspektif sosial-kelembagaan, yang juga menegaskan bahwa ikatan kekerabatan lintas batas dapat menjadi modal sosial sekaligus celah kerawanan. Perbedaannya, jika Setiawati dkk. menyoroti dinamika tersebut dari sudut pandang tata kelola perbatasan secara umum, penelitian ini menunjukkan secara lebih spesifik bagaimana modal sosial itu dikonversi menjadi bagian aktif dari sistem deteksi dini kontra intelijen di tingkat satuan pelaksana. Temuan mengenai pentingnya sinergi antarlembaga juga menguatkan simpulan Kurniawan dkk. (2024), meski dalam konteks berbeda: jika

Kurniawan dkk. menekankan pendekatan persuasif (*soft power*) terhadap masyarakat dalam penanganan terorisme, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan serupa juga relevan diterapkan dalam konteks kontra intelijen yang secara doktrinal lebih bersifat defensif-preventif.

Strategi Penguatan Pelaksanaan Kontra Intelijen

Perumusan strategi penguatan dianalisis menggunakan kerangka strategi Lykke, yang menekankan keseimbangan antara tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sumber daya (*means*). Hasil analisis tematik menunjukkan tiga arah penguatan utama yang saling melengkapi.

Pertama, penguatan sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor, diwujudkan melalui gagasan pengembangan sistem deteksi dini terpadu yang memadukan pendekatan *human intelligence* dengan pelaporan digital, serta pembentukan forum koordinasi kontra intelijen perbatasan sebagai wadah formal pertukaran data. Kedua, peningkatan profesionalisme dan kapasitas personel, melalui program pembinaan berjenjang yang mencakup pelatihan teknik investigasi lapangan, analisis data digital, dan kemampuan komunikasi sosial. Ketiga, modernisasi sistem informasi dan teknologi intelijen, melalui rencana pengembangan sistem pelaporan digital terenkripsi yang terhubung dari pos lapangan hingga pusat komando, dilengkapi pusat data intelijen bersama antarinstitusi.

Dianalisis melalui kerangka Lykke, ketiga arah ini mencerminkan upaya penyelarasan antara *ends* (stabilitas keamanan perbatasan yang bebas dari infiltrasi), *ways* (deteksi dini terintegrasi, negasi terkoordinasi), dan *means* (personel terlatih, sistem digital, dan partisipasi sosial). Kesenjangan yang selama ini teridentifikasi pada elemen *means*, khususnya keterbatasan personel berkualifikasi dan sarana teknologi, menjadi titik kritis yang, jika tidak diperkuat, berpotensi menggoyahkan keseimbangan strategi secara keseluruhan, sebagaimana diperingatkan dalam model bangku berkaki tiga (*ends-ways-means*) yang menjadi rujukan analitis penelitian ini.

Arah penguatan berbasis teknologi dan koordinasi lintas lembaga ini juga memperkuat temuan Muhamanto dkk. (2025), yang menyimpulkan bahwa keberhasilan operasi intelijen strategis bertumpu pada tiga elemen: sinergi antarlembaga, pemanfaatan teknologi modern, dan perencanaan berbasis analisis intelijen. Perbedaan konteks, Muhamanto dkk. mengkaji operasi intelijen strategis di wilayah perkotaan menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan siber, justru memperkuat argumen bahwa kebutuhan modernisasi teknologi dan koordinasi kelembagaan bersifat lintas konteks, baik pada skala kota besar maupun satuan pelaksana di wilayah perbatasan terpencil. Demikian pula, penekanan pada pentingnya perlindungan data digital dan kesiapan menghadapi ancaman hibrida sejalan dengan simpulan Riyanta dan Permatasari (2025) mengenai kontra intelijen kontemporer, meski penelitian ini menunjukkan bahwa di tingkat satuan operasional, kebutuhan digitalisasi masih berada pada tahap dasar yakni peralihan dari sistem pelaporan manual ke digital dan belum menyentuh isu kompleks seperti kecerdasan buatan atau big data sebagaimana dibahas pada level strategis-nasional.

Sintesis Jawaban terhadap Rumusan Masalah

Secara keseluruhan, hasil penelitian menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan. Pertama, strategi kontra intelijen Deninteldam IX/Udayana dilaksanakan melalui empat tahap doktrinal yang berjalan secara struktural namun belum optimal secara teknis-operasional. Kedua, efektivitas pelaksanaannya ditentukan oleh interaksi lima faktor pendukung (dukungan komando, jaringan teritorial, sinergi lintas instansi, partisipasi masyarakat, dan profesionalitas personel) yang berhadapan dengan enam faktor penghambat yang saling terkait pada dimensi *structure*, *process*, dan *outcome*. Ketiga, penguatan strategi yang diperlukan bertumpu pada penyelarasan tiga elemen strategis, tujuan, cara, dan sumber daya, melalui digitalisasi sistem deteksi, peningkatan kapasitas personel, dan pelebagaan koordinasi lintas sektor secara permanen.

Temuan ini menegaskan posisi artikel dalam mengisi celah penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian Kajian Literatur, yaitu masih terbatasnya kajian kontra intelijen pada level operasional-taktis satuan pelaksana di wilayah perbatasan. Dengan mengombinasikan kerangka teori kontra intelijen, teori strategi Lykke, dan teori efektivitas organisasi Scott secara terintegrasi, penelitian ini memberikan model analisis yang dapat direplikasi pada satuan intelijen teritorial lain dengan karakteristik wilayah operasi yang berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kontra intelijen Detasemen Intelijen Kodam IX/Udayana dalam mendukung operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste telah dilaksanakan secara struktural melalui empat tahap doktrinal, deteksi, investigasi, eksploitasi, dan negasi namun belum berjalan optimal secara operasional. Kesenjangan tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan sistem analitik dan digitalisasi, sehingga hasil deteksi cenderung berhenti sebagai data situasional dan belum terkonversi menjadi produk intelijen prediktif yang siap ditindaklanjuti.

Efektivitas pelaksanaan strategi ditentukan oleh interaksi lima faktor pendukung yang berhadapan dengan hambatan pada dimensi struktur, proses, dan hasil organisasi, khususnya keterbatasan sarana teknologi, lemahnya integrasi data antarlembaga, dan minimnya pelatihan teknis lanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kontra intelijen di wilayah perbatasan bukan semata fungsi kapasitas internal satuan pelaksana, melainkan hasil interaksi sistemik antara kesiapan kelembagaan, dukungan teknologi, dan modal sosial masyarakat setempat.

Sejalan dengan kerangka strategi *ends–ways–means*, penguatan yang diperlukan ke depan bertumpu pada penyelarasan tiga elemen sekaligus: digitalisasi sistem deteksi dan pelaporan, peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan berjenjang, serta pelebagaan koordinasi lintas sektor secara permanen, bukan sekadar penguatan parsial pada salah satu elemen. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan model analisis terintegrasi yang menggabungkan teori kontra intelijen, teori strategi, dan teori efektivitas organisasi untuk memahami dinamika kontra intelijen pada level operasional-

taktis satuan pelaksana, suatu tingkat kajian yang selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan kajian kontra intelijen pada skala strategis-nasional.

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan penyusunan prosedur operasional standar (*SOP*) kontra intelijen lintas instansi, modernisasi sistem pelaporan berbasis digital terenkripsi, serta pelebagaan program edukasi kesadaran intelijen masyarakat secara berkelanjutan. Secara akademik, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model analisis terintegrasi ini pada satuan intelijen teritorial lain dengan karakteristik geografis dan sosial berbeda, guna menilai sejauh mana temuan penelitian ini bersifat dapat digeneralisasi ataukah spesifik terhadap konteks perbatasan RI–RDTL.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, M. W., Saptono, E., & Supriyatno, M. (2019). Kerja Sama General Border Committee Indonesia–Malaysia dalam Menjaga Perbatasan Darat. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(1), 55–72.
- Kurniawan, B., DAW, M., & Sudiana, I. M. (2024). Peningkatan peran intelijen TNI sebagai strategi soft power pada kebijakan pertahanan guna penanganan terorisme. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2).
- Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Policy Studies, No. 23. Washington: East-West Center.
- Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Policy Studies No. 23. Washington, D.C.: East-West Center.
- Moh. Djatmiko. (2025). Kontra Intelijen dalam Menghadapi Operasi Rahasia (Clandestine) Asing Melalui Penyelundupan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Volume 2 Nomor 1 April 2025*.
- Muhamanto, Y., Solihin, A., & Deksin, G. R. (2025). Penerapan operasi intelijen strategis di Kotama Ops TNI dalam rangka menjaga keamanan nasional. *Strategic Management Journal*.
- Poppy Setiawati Nurisnaeny, dkk. (2025). The Sovereignty and Kinship Challenge: Addressing Indonesia-Timor Leste Border Security in the Post-Conflict Era. *Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 19 No. 3*
- Posen, B. R. (1994). *The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the World Wars*. Ithaca: Cornell University Press.
- Stanislaus Riyanta dan Diah Ayu Permatasari. (2025). Kontraintelijen pada Era Kontemporer dalam Mencegah Ancaman Intelijen Asing dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional Volume 31 Nomor 2, Agustus 2025*
- Stephan, A. (1971). *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*. Princeton: Princeton University Press.
- Suharyanto. (2012). Optimalisasi Satuan Kontra Intelijen Untuk Penanggulangan Aksi Terorisme. *Jurnal Ketahanan Nasional, Volume XVII Nomor 3 Desember 2012*.
- Udayanto, W.S. (2024). Strategi Intelijen Militer Dalam Merespon Ancaman di Papua. *Santhet*, 7(1).
- Yosa Bayu Koswara. (2019). Evaluasi Fungsi Kontra Intelijen dalam Menghadapi Spionase Intelijen Asing. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019*
- Yosua Praditya Suratman. (2017). Penggunaan Strategi Operasi Kontra Intelijen Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Siber Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2*
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*.

- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/944/XII/2020 tentang Doktrin Intelijen TNI AD. (2020).
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/35/I/2025 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Kasad Tahun 2025. (2025).
- Riyanta, S., & Permatasari, D. A. (2025). Kontraintelijen pada era kontemporer dalam mencegah ancaman intelijen asing dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 31(2).
- Setiawati Nurisnaeny, P., dkk. (2025). The sovereignty and kinship challenge: Addressing Indonesia-Timor Leste border security in the post-conflict era. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 19(3).
- Stephan, A. (1971). *The military in politics: Changing patterns in Brazil*. Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. (2011).

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

